

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan dokumen tertulis yang berisi kondisi keuangan perusahaandimana mencatat semua aktivitas keuangan atau kegiatan bisnis dalam suatu periode tertentu. Kelangsungan suatu usaha serta pertumbuhan usaha ditinjau dari laporan keuangan yang dibuat serta diteliti oleh pemilik usaha sehingga diketahui kelangsungan kegiatan bisnisnya. Laporan keuangan sebagaimana merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan yang mana harus mempunyai kualitas sebab penafsiran berasal dari laporan keuangan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Maka dari itu dalam pengambilan keputusan haruslah benar dan ditingkatkan kualitasnya sehingga informasi yang tersaji juga menjadi berkualitas. Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas harus dapat dipahami, relevan, keandalan serta dapat dibandingkan (SAK 2009). Laporan keuangan diperlukan dalam menyampaikan informasi kepada pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang dapat dilihat dari penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan bagi entitas.

Pemerintah dalam menetapkan peraturan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar khususnya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) menjadi pendorong usaha mikro

kecil dan menengah di Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan, dan ketrampilan pemilik usaha agar mampu mengelola laporan keuangan dengan baik sehingga akses yang diperoleh semakin luas. Dengan begitu para pelaku usaha dengan mudah mendapatkan pembiayaan dari instansi perbankan. Karena laporan keuangan yang disusun baik sehingga memberikan informasi yang jelas bagi pihak yang berkepentingan.

Penerapan SAK EMKM merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyusun dan mengesahkan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas MikroKecil Menengah) tahun 2016 dan ditetapkan secara efektif pada 1 Januari 2018 untuk membantu pelaku UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pelaporan keuangan (Ayem & Maknun, 2020). SAK EMKM dibuat secara khusus sebagai parameter standar akuntansi keuangan UMKM, yang mana hal ini sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM karena laporan keuangan menjadi hal yang penting dalam sebuah usaha (Farina & Opti, 2019). Penerapan SAK EMKM pada laporan keuangan dapat memberikan informasi berupa laporan posisi keuangan, beberapa statistik dan catatan laporan keuangan (Nuvitasari et al., 2019). Sehingga kepercayaan investor atau Bank dapat meningkat dari penerapan SAK EMKM dalam pengembangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu penggunaan sistem informasi akuntansi. Pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya agar dapat bersaing dan berkembang membutuhkan sistem informasi

akuntansi (Effendi & Harahap, 2019). Namun dalam menjalankan usahanya, UMKM kerap kali dihadapkan dengan berbagai masalah yang menyebabkan UMKM tidak dapat berkembang dan tumbuh. Semakin meningkatnya jumlah UMKM memunculkan permasalahan klasik seputar pembiayaan serta pengembangan usaha. Sehingga penggunaan sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang disampaikan kepada pemakai eksternal dan pemakai internal.

Selanjutnya faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu ukuran usaha. Besar kecilnya sebuah organisasi atau perusahaan dapat ditunjukkan melalui ukuran usaha yang dapat diukur dengan beberapa cara (Suastini et al., 2018). Ukuran usaha yang semakin kecil lebih cenderung pula pelaku usaha tidak peduli terhadap laporan keuangan, sehingga pelaku usaha lebih cenderung terhadap pencatatan sederhana. Pelaku UMKM yang cenderung menerapkan pencatatan sederhana yakni mereka yang merupakan pelaku usaha kecil yang kurang mengetahui pentingnya pencatatan laporan keuangan serta rendahnya mengenai akuntansi.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha ekonomi rakyat dalam lingkup kecil yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perorangan atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) cukup memiliki peran penting dalam sektor ekonomi maupun sektor daerah. Jumlah pelaku UMKM saat ini sebanyak 99% yang tersebar di Indonesia dan 60% pelaku UMKM berkontribusi terhadap produk *domestic bruto* nasional. Hal ini menjadikan

penyerapan tenaga kerja di Indonesia juga meningkat (Ayem & Maknun, 2020). UMKM menjadi harapan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Adanya UMKM ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat menjadi wirausaha. UMKM memberikan kesempatan kerja menjadi terbuka luas, sehingga semakin berkurang pula tingkat pengangguran di Indonesia. Selain itu, pengembangan UMKM dapat meningkatkan perekonomian dan memberikan kontribusi dalam mempercepat perubahan sistem perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional (Avrizal et al., 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Niode (2019) ditemukan tiga permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia. Pertama, isu negatif terkait peningkatan UMKM yang dilimpahkan kepada instansi.. Kedua, pemberian dana subsidi jaringan pengaman social (JPS) yang tidak jelas dan tidak terarah. Kemudian yang ke-tiga proses pengambilan kredit perbankan juga sulit diakses oleh pelaku UMKM, dikarenakan rumitnya prosedur serta banyaknya pelaku UMKM yang belum mampu memenuhi persyaratan dari bank.

Melalui website Smesco yang merupakan lembaga resmi di bawah Kementerian Koperasi dan UKM Republik mencatat pada tahun 2022 tercatat pada terdaftar lebih dari 70,5 juta UMKM ada diseluruh Indonesia. Meskipun demikian, pelaku UMKM masih memiliki kendala dalam mendapatkan pengelolaan maupun dalam peningkatan usahanya. Menurut Bank Indonesia, dilihat dari sisi pengembangan usaha, pelaku UMKM masih memiliki

keterbatasan informasi mengenai acuan pembiayaan untuk komoditas tertentu. Kemudian di sisi lain, pihak bank juga membutuhkan informasi terkait komoditas yang berpotensi untuk dibiayai. Pelaku UMKM banyak yang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan untuk memperoleh akses kredit bank atau lembaga keuangan lain. Hal ini disebabkan karena adanya kendala teknis maupun nonteknis.. Sebagai contoh kendala teknis yaitu yang tidak mempunyai atau tidak cukup agunan, kemudian kendala nonteknis, misalnya keterbatasan memperoleh informasi ke perbankan. Sehingga dari hal tersebut menjadikan pelaku UMKM tidak dapat menilai dan mengukur kinerja keuangan dengan tepat dan benar. Selain itu beberapa keputusan keuangan juga tidak dilakukan berdasarkan informasi yang akurat (Siswanti & Suryati, 2020).

Kota Purbalingga merupakan salah satu kota yang berkembang dan tumbuh dengan berbagai macam usaha, seperti usaha yang berkembang pesat saat ini terdapat pada UMKM, salah satunya UMKM Knalpot. UMKM knalpot yang terdapat di Purbalingga merupakan usaha yang sudah mendunia dalam penjualannya. Komitmen pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam memajukan pengembangan ekonomi kreatif sebagai basis peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberi dukungan kepada pelaku UMKM. Namun dua tahun terakhir adanya pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pelaku UMKM, tidak terkecuali UMKM di Purbalingga. Dalam PerBup Purbalingga No 12 Tahun 2021 menyebutkan bahwa dampak Covid 19 begitu luas terhadap perekonomian Nasional dan

Daerah tidak terkecuali bagi para pelaku UMKM. Keadaan pandemi ini mengakibatkan penurunan mencapai 70% yang mana sektor yang paling terdampak bidang kerajinan, seperti batik dan knalpot (Tribun Banyumas 2021). Hal ini memberikan dampak terhadap keberlangsungan usaha knalpot yang ada di wilayah Purbalingga yang dapat mengganggu kegiatan produksi dan pemasaran knalpot akibat pandemic covid-19. Jika pelaku UMKM tidak membuat inovasi serta mengembangkan usaha, maka kemungkinan pula banyak pelaku UMKM yang tidak dapat melanjutkan usahanya. Dalam pengembangan usaha pelaku UMKM tentunya membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Oleh karena itu, membutuhkan pendanaan yang berasal dari pihak ketiga, seperti bank atau sejenisnya tidak hanya dari modal pribadi saja. Agar akses bank diperoleh dengan mudah, maka pelaku UMKM harus membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Sehingga penggunaan informasi akuntansi pada UMKM knalpot di wilayah Purbalingga ini diharapkan dapat membantu pengelolaannya untuk pengembangan bisnis UMKM serta menilai kinerja usaha pada setiap periode, sehingga ketika terjadi krisis kembali mereka dapat segera mencari solusi yang tepat untuk mengatasi. Berdasarkan penelitian Subagio & Saraswati, (2020) menyatakan bahwa pelaku UMKM di Purbalingga dalam pemahamannya di bidang akuntansi masih kurang, terkait bagaimana pelaku usaha membuat, menggunakan sertamemaksimalkan peran informasi akuntansi. Sehingga dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan usaha bagi pelaku UMKM, informasi akuntansi tidak menjadi faktor penting.

Beberapa penelitian tentang penerapan SAK EMKM telah dilakukan, oleh Annisa et al., (2020) yang menyatakan bahwa SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Hasil tersebut serupa dengan penelitian milik Sri & Risma, (2020) bahwa Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada UMKM. Kedua hasil tersebut menyebutkan bahwa pengetahuan yang memadai terkait akuntansi dan SAK EMKM bagi pelaku UMKM akan mendorong pelaku UMKM menyusun laporan keuangan yang baik serta berkualitas. Sedangkan penelitian (Cahyani et al., 2020) akuntansi berbasis SAK EMKM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Jahormin Simarmata, SE., Ak. & Afriani, (2021) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Hasil penelitian Lestari & Dewi, (2020) pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suastini et al., (2018) dan Rejeki, SE., Ak., M.Si., CA. & Kautsar, (2020), dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran usaha berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Pendapatan pengelola terkait semakin tingginya tingkat transaksi dan kompleksitas suatu usaha dipengaruhi dari besarnya ukuran usaha yang dimiliki pelaku UMKM. Sehingga makin besarnya ukuran usaha diharapkan mampu mendorong pengelola untuk mempelajari dan memikirkan tentang

solusi dalam menghadapinya terkait pembukuan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Duwinaeni, (2020), Cahyani et al., (2020), Hasani & Ainy, (2018) dan Ayuningtyas et al., (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran usaha tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan. Dari beberapa hasil penelitian diatas memberikan kesimpulan yang belum konsisten, sehingga perlu adanya penelitian kembali.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nursalim et al., (2019) yang meneliti tentang pengaruh akuntansi berbasis SAK EMKM terhadap kualitas laporan keuangan dengan studi empiris pada UMKM yang ada di Kabupaten Pasuruan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nursalim et al., (2019) adalah sama-sama meneliti faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada UMKM. Alasan penulis melakukan pengembangan adalah untuk menguji kembali kebenaran bahwa akuntansi berbasis SAK EMKM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nursalim et al., (2019) yang pertama adalah penambahan variabel independen. Pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu SAK EMKM yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sedangkan pada penelitian ini telah ditambahkan variabel independen penggunaan sistem informasi akuntansi dan ukuran usaha. Alasan ditambahkan variabel tersebut agar variabel penelitian lebih beragam untuk mengidentifikasi kualitas laporan keuangan pada pelaku UMKM. Sistem informasi akuntansi juga merupakan elemen yang

penting bagi keberlangsungannya suatu usaha. Saraswati et al., (2021) dalam penelitiannya menyebutkan penerapan sistem informasi akuntansi memiliki manfaat bagi pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan, mengetahui naik turunnya laba usaha, mengetahui pemasukan pendanaan, serta pengeluaran untuk mengetahui grafik penjualan dan produksi pada pelaku UMKM. Begitu juga variabel ukuran usaha. Variabel ukuran usaha merupakan hal penting dalam lingkungan pengelola UMKM. Ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengelola UMKM terkait semakin tingginya tingkat transaksi UMKM. Sehingga diharapkan dengan semakin besarnya ukuran usaha maka dapat mendorong pengelola usaha untuk belajar dan berpikir terkait solusi untuk menghadapinya (Rejeki & Kautsar, 2020).

Kemudian perbedaan yang kedua adalah sampel yang digunakan oleh sebelumnya adalah UMKM yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah UMKM Knalpot yang ada di Kota Purbalingga. Alasan penulis mempersempit obyek penelitian karena ingin memfokuskan pada satu persoalan, yaitu UMKM knalpot.

Berdasarkan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang kualitas laporan keuangan UMKM. sehingga penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah, Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi dan Ukuran Usaha terhadap Kualitas Laporan Keuangan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM ?
2. Apakah penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM ?
3. Apakah ukuran usaha berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan UMKM ?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang akan diteliti lebih terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya membahas penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), sistem informasi akuntansi dan ukuran usaha terhadap kualitas laporan keuangan UMKM knalpot Purbalingga.
2. Sampel penelitian ini adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) knalpot yang ada di Kabupaten Purbalingga tahun 2022.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah untuk :

1. Untuk memperoleh bukti bahwa penerapan SAK EMKM terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh positif pada pelaku UMKM knalpot Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk memperoleh bukti bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh positif pada pelaku UMKM knalpot Kabupaten Purbalingga.
3. Untuk memperoleh bukti bahwa ukuran usaha terhadap kualitas laporan keuangan berpengaruh positif pada pelaku UMKM knalpot Kabupaten Purbalingga.

E. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis
Memberikan pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peningkatan pemahaman standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah, penggunaan sistem informasi akuntansi dan ukuran usaha serta kualitas laporan keuangan UMKM dalam menjalankan usaha.
2. Aspek Praktis
 - a. Sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya tepatnya dalam hal wawasan mengenai masalah peningkatan kualitas laporan keuangan pelaku UMKM.
 - b. Sebagai saran bagi pihak yang terkait untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pelaku UMKM.
 - c. Sebagai metode penerapan prosedur ilmiah yang telah dipelajari guna meningkatkan ilmu dan pengetahuan.